



**SALINAN**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**NOMOR 188.44/124/KPTS/2025**

**TENTANG**

**PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
TAHUN 2025**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2025;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);
5. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,  
APRIILA H. SIREGAR  
Pemimpin Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690421 199003 2 003

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 3 Februari 2025  
Pj.GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

A. FATONI

Salinan disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.44/124/KPTS/2025  
TANGGAL 3 Februari 2025

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA  
UTARA TAHUN 2025

No.	Judul	Instansi /Dinas Pemrakarsa
1.	Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara	Biro Organisasi
2.	Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara	Biro Organisasi
3.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah	Biro Organisasi
4.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Biro Organisasi
5.	Standar Kompetensi Jabatan	Biro Organisasi
6.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri	Biro Administrasi Pembangunan
7.	Pencabutan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Lokasi Wisata Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan	Biro Perekonomian
8.	Pencabutan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Sumatera Utara.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor dan Alat Berat	Badan Pendapatan Daerah

10.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah
11.	Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah
12.	Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa	Badan Pendapatan Daerah
13.	Dokumen Pemungutan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah
14.	Petunjuk Pelaksanaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah
15.	Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air, Harga Air Baku dan Harga Dasar Air Permukaan Untuk Penetapan Pajak Air Permukaan	Badan Pendapatan Daerah
16.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penetapan Nilai perolehan Air Permukaan pembangkit Listrik Tenaga Air Sigura-Gura PT. INALUM pada Sungai Asahan	Badan Pendapatan Daerah
17.	Pedoman Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah
18.	Pengurangan Pokok Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah
19.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
20.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
21.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera utara tahun 2025	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
22.	Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pengelolaan Data Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
23.	Rencana Induk Pembangunan Ketenagakerjaan berbasis Sektor Unggulan Tahun 2025-2029	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
24.	Perencanaan Pembangunan dan Perlindungan Ekosistem Gambut Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2054	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

25.	Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Sumatera Utara 2025-2029	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
26.	Pola tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
27.	Pola tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
28.	Pengembangan Dunia Usaha dan Pemberdayaan Pelaku Usaha di Provinsi Sumatera Utara	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
29.	Pengelolaan Sampah berbasis Sumber	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
30.	Integrasi Budidaya Ternak dengan Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara	Dinas Perkebunan dan Peternakan
31.	Sistem Data Gender Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
32.	Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
33.	Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
34.	Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Inspektorat

35.	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Inspektorat
36.	Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi,dan Hidrogeologi di Provinsi Sumatera Utara	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
37.	Penetapan Kelas jalan Provinsi	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
38.	Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
39.	Kebijakan dan Rencana Strategis Daerah Penyelenggaraan Sistem Air Minum Provinsi Sumatera Utara	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
40.	Kebijakan dan Rencana Strategis Daerah Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Provinsi Sumatera Utara	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
41.	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayaan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan	Dinas Kesehatan
42.	Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan	Dinas Kesehatan
43.	Pedoman Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah	Dinas Kesehatan
44.	Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah	Dinas Kesehatan
45.	Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah	Dinas Kesehatan
46.	Penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer	Dinas Kesehatan
47.	Stimulan Kader Posyandu	Dinas Kesehatan
48.	Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat	Dinas Kesehatan
49.	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Provinsi Sumatera Utara	Dinas Kesehatan
50.	Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin	Dinas Kesehatan

51.	Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Muhammad Ildrem	Dinas Kesehatan
52.	Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Muhammad Ildrem	Dinas Kesehatan
53.	Kerja Sama dan Investasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Muhammad Ildrem	Dinas Kesehatan
54.	Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Muhammad Ildrem	Dinas Kesehatan
55.	Sumber Daya Manusia dan Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Muhammad Ildrem	Dinas Kesehatan
56.	Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara	Dinas Kesehatan
57.	Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara	Dinas Kesehatan
58.	Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara	Dinas Kesehatan
59.	Tarif Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara	Dinas Kesehatan

60.	Sumber Daya Manusia dan Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara	Dinas Kesehatan
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

A. FATONI



APRILLA H. SIREGAR  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690421 199003 2 003